

PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT(BPR) DALAM MENINGKATKAN KEBERHASILAN SEKTOR UMKM

Suhartono

e-mail : tono@ut.ac.id

¹⁾Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

ABSTRACT

One of the factors that influence the success of a business is the capital of the business. Thus, the role of government and private institution in providing this need is very essential. It can be in the form of a credit loan by financial institution, commercial bank, government bank or rural bank. The role of rural bank as a creditor has shown a good performance. This article will discuss the role of rural bank in supporting the Small and Medium Enterprise sector in Indonesia.

The total credit which was distributed by rural bank until October 2011 was 40,26 trillion. This value was increasing 20,96% comparing to the previous year, 33 trillion rupiah. Most of those credit was productive credit of micro unit, small and medium enterprise. However, those credit was considered small because it was less than 5% from the total credit of national banking industry. The portion of debtor s' credit account was 23% from the national debtors' credit account. The total assets grew significantly that year until 20,56%. Based on the data, the prospect of rural bank in increasing the role of small and medium enterprise is widely open. Bank of Indonesia should encourage the role of rural bank through conducive regulation, so the rural bank can give big contribution in increasing the Small and Medium Enterprise. Hopefully, the grow of rural bank can be a good news for the development of Small and Medium Enterprise sector which can increase the revenue and the welfare of middle to low level of economic agents.

Keywords: *rural bank, small and medium enterprise, capitalization.*

ABSTRAK

Keberhasilan suatu usaha salah satunya dipengaruhi oleh masalah permodalan. Oleh karena itu peran pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan modal sangat diperlukan. Peran tersebut pada umumnya diberikan dalam bentuk pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik bank umum, bank pemerintah maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peranan BPR sendiri sebagai pemberi kredit menunjukkan kinerja yang semakin meningkat. Artikel ini ingin mengulas secara khusus peranan BPR dalam mendorong sektor UMKM di Indonesia.

Nilai kredit BPR yang disalurkan sampai dengan bulan Oktober 2011 sebesar Rp 40,26 triliun. Angka ini meningkat 20,96% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 33

triliun. Sebagian besar kredit tersebut merupakan kredit produktif Unit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun demikian jumlah kredit BPR tersebut masih tergolong kecil, yaitu kurang dari 5% dari porsi kredit industri perbankan nasional. Dari sisi jumlah rekening debitur kredit, porsinya 23% dari total rekening debitur nasional. Sementara itu nilai aset BPR tumbuh secara signifikan hingga 20,56 pada tahun tersebut. Dengan data tersebut maka potensi BPR untuk meningkatkan peran UMKM sangat terbuka. Bank Indonesia selanjutnya mendorong peningkatan peran BPR melalui berbagai regulasi yang akan menciptakan iklim kondusif sehingga BPR memiliki kontribusi besar untuk ikut andil dalam meningkatkan ekonomi sektor UMKM. Berkembangnya BPR diharapkan akan membawa angin segar untuk kemajuan sektor UMKM yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku ekonomi tingkat menengah kebawah.

Kata Kunci: BPR,UMKM, permodalan

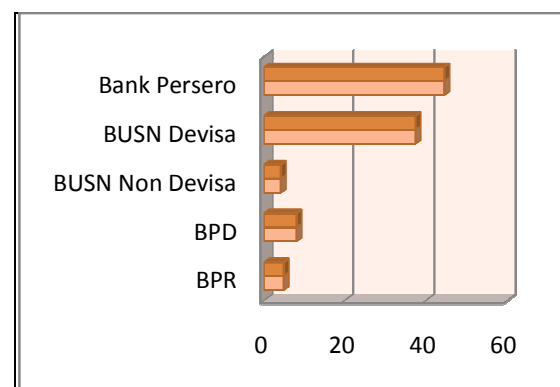
PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu usaha salah satunya dipengaruhi oleh masalah permodalan. Oleh karena itu peran pemerintah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan modal sangat diperlukan. Peran tersebut pada umumnya diberikan dalam bentuk pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan, baik bank umum, bank pemerintah maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peranan BPR sendiri sebagai pemberi kredit menunjukkan kinerja yang semakin meningkat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR meliputi, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembinaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito

berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Keberadaan BPR bagi masyarakat di daerah perdesaan diharapkan mampu menjadi ujung tombak dalam pembiayaan sektor UMKM. Namun demikian, penyaluran kredit bank umum terhadap UMK masih rendah hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya (1) masih terbatasnya informasi berkaitan UMKM (2) tingginya resiko UMKM dan (3) masih tingginya bunga kredit yang disebabkan karena perbankan belum efisien, target profit yang harus dicapai dan adanya mekanisme *price leader* dan *price follower* dalam penurunan suku bunga (Kompas, 2003; Baas dan Schrooten, 2005. Herry,2007)).



Gambar 1. Jumlah Bank Domestik, 2011

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa menurut kelompok bank kredit UMKM sebagian besar disalurkan oleh kelompok Bank Persero sebanyak Rp 218.9 milyar (44.5 persen), diikuti kelompok Bank Swasta Nasional Divisa Rp 176,3 milyar (37,4 persen). Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp 37,6 milyar (7,9 persen), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 22.9 milyar (4,8 persen) dan Bank Swasta Non Devisa sebesar Rp 18,1 milyar (4,1 persen). Menurut sektor ekonomi penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah masih didominasi oleh sektor perdagangan dan sektor industri masing-masing sebesar 44,3 persen dan 10,5 persen.

Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa selama 6 bulan dalam tahun 2012 jumlah BPR hanya bertambah 2 BPR, sementara itu sumber dana mengalami peningkatan sebesar Rp 4.227.784.187.000 (8,96 persen) penanaman dana (kredit yang diberikan) Rp 4.027.887.153 (8,3 persen), jumlah nasabah 111.081 orang (0,89 persen).

Bila dilihat dari tidak adanya perubahan dalam pendirian BPR hal ini dapat disebabkan karena untuk saat ini Bank-bank besar

Tabel 1. Kegiatan Usaha BPR Konvensional Skala Nasional Periode : April– September 2012

Indikator	Tahun 2012					
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Jumlah BPR	1,667	1,668	1,666	1,669	1,669	1,669
Sumber Dana (Rp. Ribu)	47.171.939.188	47.987.030.842	48.726.064.019	49.302.910.176	50.147.580.059	51.399.623.375
Penanaman Dana (Ribu)	55.655.437.190	56.668.334.930	57.636.380.021	58.336.810.914	59.205.877.113	60.771.788.250
Kredit yang Diberikan	44.472.354.714	45.448.157.755	46.636.689.904	47.604.957.691	47.947.334.076	48.500.241.867
Antar Bank Aktiva	11.183.046.681	11.220.177.175	10.999.690.117	10.731.853.223	11.258.210.416	12.271.546.383
Jumlah Nasabah	12.393.125	12.419.801	12.472.881	12.435.222	12.950.773	12.504.205
Total Asset (Ribu)	57.965.743.053	58.980.286.089	60.033.549.359	60.867.874.335	61.782.517.582	63.384.589.908

Sumber : Bank Indonesia, 2012

KENDALA BERKEMBANGNYA BPR

Secara umum terlihat adanya peran BPR di dalam pembiayaan UMKM, akan tetapi beberapa kendala masih dijumpai

memiliki *trend* untuk mendirikan unit mikro, untuk menjangkau nasabah-nasabah mereka yang selama ini tidak bisa dibantu melalui kredit konvensional bank tersebut. Seperti halnya Bank Danamon yang membuka Danamon Simpan Pinjam (DSP). Bukopin dengan Swamitra, BRI dengan Teras BRI dan lain-lain (Rifka, 2012).

Dalam hal penyaluran kredit tersebut peningkatan yang rendah (8,3 persen) diakibatkan oleh *pertama* tidak adanya supervisi atas kredit yang disalurkan dan yang *kedua* adalah tingginya tingkat bunga kredit BPR dibanding dengan lembaga keuangan seperti bank umum di mana bank ini merupakan Bank BPR dalam menyalurkan kredit pembiayaan pada UMKM (Holloh, 2001 dalam Herri, 2007).

Persaingan antara BPR dengan sesama BPR ataupun dengan lembaga sejenis lainnya seperti dengan bank umum dan lembaga keuangan mikro lainnya akan mempengaruhi kemampuan BPR untuk tetap hidup dan berkembang.

dalam kegiatannya. Kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan sumbernya yaitu dari internal dan eksternal BPR.

Secara internal kendala yang dihadapi oleh BPR, *pertama* adalah tingkat bunga kredit yang dianggap terlalu tinggi.

Tingginya tingkat bunga ini disebabkan oleh kombinasi *cost of fund*, *risk premium* dan biaya operasional BPR yang tinggi. Tingginya *cost of fund* karena sumber dana BPR berasal dari dana berbunga tinggi seperti dari bank umum, dan dari deposito/tabungan masyarakat yang diperoleh dengan memberikan tingkat bunga yang lebih besar dibandingkan bank umum.

Kedua informasi keberadaan BPR yang belum optimal dan belum banyak diketahui oleh UMKM di sekitar wilayah operasi BPR. Akibatnya, nasabah potensial tidak bisa dilayani dengan baik. Hal ini mungkin saja berkaitan dengan metode promosi yang dilakukan oleh BPR belum sesuai dengan karakteristik nasabah potensial.

Secara eksternal peran BPR dalam pembiayaan BPR menghadapi beberapa kendala berikut ini :

Pertama, kondisi perekonomian yang dianggap dapat mengurangi kemampuan BPR dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM.

Kedua, munculnya pandangan bahwa BPR menghadapi persaingan dari berbagai dimensi diantaranya produk yang ditawarkan, tingkat bunga, mutu pelayanan. Persaingan ini tidak hanya dari BPR yang lain tetapi juga dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Walaupun persaingan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, akan tetapi jika sudah sampai pada tingkat yang terlalu tinggi akan mengakibatkan menurunnya profit yang pada akhirnya akan mempengaruhi eksistensi usaha (Schafer *et al*, 2005 dalam Herry, 2007).

Dalam hal produk, Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal tiga belas membatasi usaha yang dilakukan oleh BPR hanya pada empat jenis, yaitu : menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. Sedangkan jasa seperti giro, transfer dan *fee based income* lainnya tidak diperbolehkan. Hal ini tentu menimbulkan hambatan kepada BPR untuk mengembangkan pelayanan. Sementara itu BPR harus bersaing dengan beberapa bank umum yang juga melayani kredit mikro seperti BRI Unit Desa dan Danamon Simpan Pinjam dengan variasi produk yang lebih beragam. Hal ini tentunya akan semakin memperberat persaingan yang dihadapi oleh BPR.

Disamping kendala internal dan eksternal terdapat aturan dari Bank Indonesia dalam bentuk regulasi dan BI di mana BI masih memberlakukan regulasi yang ketat terhadap pihak-pihak yang ingin mengembangkan BPR. Selama ini BPR sering mendapat kesulitan dalam pendirian kantor-kantor cabang. Meski dalam API (Arsitektur Perbankan Indonesia) disebutkan bahwa BPR akan mendapat kemudahan izin ketika hendak membuka cabang, dalam kenyataannya masih jauh dari ideal karena terkendala regulasi yang ketat.

Regulasi ketat itu, misalnya, syarat modal minimal harus Rp 2 miliar untuk BPR yang didirikan di DKI Jakarta dan sekitarnya, Rp 1 milyar untuk BPR yang didirikan di Ibukota provinsi di luar DKI Jakarta, Rp 500 juta untuk BPR yang didirikan di luar DKI Jakarta dan Ibukota Provinsi lainnya; dan keharusan memiliki pengalaman mengelola bisnis yang sama minimal dua tahun bagi calon direksi BPR,

di mana syarat itu harus dipenuhi oleh 50% anggota Direksi.

Regulasi yang ketat ini sangat mengganggu pertumbuhan BPR. Padahal, menurut Perhimpunan BPR se – Indonesia (Perbarindo), minat untuk mendirikan BPR di sejumlah daerah terutama di Jawa dan Bali sangat tinggi (Irawan, 2011).

PENINGKATAN KINERJA BPR

Untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan BPR Bank Indonesia telah meminta kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) menargetkan porsi kredit yang lebih besar pada sektor-sektor produktif serta meningkatkan fungsi intermediasi khususnya para pelaku UMKM dengan mengajak BPR bekerjasama, baik melalui *Linkage program* maupun menjadi APEX bank (bank Induk bagi BPR). *Linkage program* antara BPD dengan BPR juga merupakan upaya meningkatkan peran BPR pada sektor UMKM dan masyarakat di wilayah operasionalnya, terutama masyarakat kelas bawah.

Selama ini disadari bahwa tingkat bunga yang diberikan BPR kepada kredit relative tinggi dan dinilai memberatkan. Oleh karena itu apabila BPD sebagai mitra BPR dapat menekan suku bunga yang pada gilirannya akan menguntungkan debitur-debitur BPR (Business News, 2011).

Sampai saat ini baru empat bank pembangunan daerah (BPD) yang menjadi APEX BPR yaitu Bank Jatim, Bank Riau, dan Kepulauan Riau, Bank Nagari dan Bank Kalsel. Dengan adanya APEX ini diharapkan komitmen Bank umum untuk mengayomi BPR dan kemudian secara bersama-sama mengarahkan tujuan akhir pada peningkatan jumlah UMKM yang terlayani dengan suku bunga yang relatif mudah terjangkau.

PERANAN BPR TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM

BPR merupakan lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM, karena posisi strategis yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada masyarakat yang lebih sederhana serta lebih mengutamakan pendekatan personal. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu pendorong meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia. Tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

- a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Peran BPR terhadap UMKM dapat dilihat dari peningkatan jumlah kredit dan jumlah nasabah BPR. Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam satu semester (2012) jumlah kredit yang disalurkan naik sebesar Rp 4.027.887.153.000 atau 8,3% dan jumlah nasabah naik sebesar 111.081 nasabah atau naik sebesar 0,89%. Peran BPR terhadap UMKM juga berpengaruh terhadap bertambahnya kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TRANSFORMASI INDUSTRIAL BERBASIS UMKM

Pada masa ekonomi Orde Baru (1965-1998), mantan Presiden Soeharto dengan tim ekonominya mengandalkan tiga sumber pertumbuhan ekonomi : (1) mobilisasi modal fisik asing dan dalam negeri, (2) memanfaatkan upah tenaga kerja (SDM) dengan upah yang lebih murah, dan (3) eksploitasi produk primer seperti hasil hutan, tambang dan pertanian. Setelah krisis ekonomi Asia tahun 1997, pelajaran berharga yang dapat diambil terlihat dari struktur tiga sumber pertumbuhan ekonomi yang berubah. Sumberdaya alam sudah berkurang, upah riil meningkat dan modal asing berkurang secara dramatis. Apa yang belum diuji adalah faktor teknologi, investasi SDM dan efisiensi.

Sumber pertumbuhan ekonomi yang relatif mudah dicapai (*easy part*) sudah berlalu dan dalam pemulihan ekonomi, Indonesia dihadapkan pada masalah yang lebih sulit (*hard part*) dalam pencarian sumber pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan potensial dalam menciptakan lapangan kerja. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilihan yang strategis dan cocok untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Kerangka dasar menyoroti kebijakan UMKM tidak dapat dilihat secara terisolasi, karena perannya yang besar dan bertautan dengan berbagai masalah sosial dan politik. Misalnya UMKM membutuhkan stabilitas pasar domestik dan peningkatan pendapatan.

Program pemulihan ekonomi yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan kerja adalah menyusun program berskala nasional berupa transformasi sektor informal bagi jutaan usaha kecil dan mikro menjadi

pelaku ekonomi formal. Melalui proses normalisasi usaha ini diharapkan kinerja sektor swasta (di daerah pada umumnya didominasi UMKM) dapat meningkatkan kinerja outputnya dalam penciptaan lapangan kerja.

Tiap Daerah, Kota, Kabupaten dan Propinsi, diharapkan memiliki program penguatan sektor swasta sebab penguatan itu merupakan kunci penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Melangkah dalam penguatan UMKM di dalam sektor swasta, paling tidak ada tiga peranan utama pemerintah nasional dan local : (1) secara aktif mencari pertumbuhan ekonomi, (2) menciptakan iklim usaha yang kondusif dan (3) membuka akses terhadap sumber dinamika pertumbuhan internal UMKM itu sendiri, seperti : pembiayaan dan kredit, akses pasar, teknologi dan perbaikan manajemen.

Berikut kebijakan yang diusulkan untuk meningkatkan peranan UMKM dalam kerangka penciptaan lapangan kerja (Tambunan, 2004).

- 1) Meningkatkan peranan UMKM dalam ekonomi hanya dapat dicapai *via* pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik dan alat komunikasi. Pembangunan infrastruktur ini, terutama dilakukan pada pusat-pusat kegiatan penopang seperti membangun pusat-pusat teknologi terapan secara langsung, promosi produk UMKM di daerah-daerah (antara lain melalui : perusahaan dan lembaga terapan), dan secara berendana menyiapkan diri untuk alokasi spasial Kabupaten/Kota/Propinsi. Dengan demikian, dalam perencanaan kota kepentingan tata ruang untuk pengembangan UMKM sangat perlu dan strategis dilakukan.
- 2) Strategi pengembangan UMKM mempunyai 3 inti : (1) membangun

industrial *linkage programs* seperti sub-kontrak industrial, keterkaitan dengan sektor dan kegiatan ekonomi lainnya, (2) proses pendampingan dapat dilakukan perusahaan, lembaga-lembaga yang kompeten dalam peningkatan kemampuan usaha termasuk permodalan, dan (3) mengembangkan sektor industri yang berbasis keuntungan tetapi mengabsorpsi tenaga kerja baru.

- 3) Di dalam menentukan arah kebijakan, pemerintah mengintegrasikan peranan UMKM ke dalam strategi industri yang lebih luas. Ada tiga pilihan strategi (ini tergantung kondisi ekonomi dan budaya lokal) yaitu mendahulukan akumulasi modal (*capital accumulation*), akumulasi pengembangan sumberdaya manusia (*human resource development accumulation*) serta akumulasi teknologi (*technological accumulation*). Sudah saatnya penekanan program pengembangan teknologi dan akses pasar dalam transformasi sektor informal ke formal merupakan kunci menyusun kekuatan dalam memasuki pasar global.
- 4) Perangkat lembaga keuangan yang ada sekarang, perlu didorong ke arah beragam sistem keuangan dan pembiayaan agar dapat melakukan dua fungsi : penyaluran modal kerja dan investasi sampai tingkat bawah. Dengan demikian, perkreditan dari lembaga-lembaga pembiayaan yang ada agar tetap dipertahankan. Pencabangan bank (seperti dipelopori Bank Rakyat Indonesia), diikuti pengembangan pembiayaan alternatif (seperti Bank Perkreditan Rakyat, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan alternatif lainnya) perlu dikembangkan.

PENUTUP

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai sumbangan yang cukup berarti bagi penyediaan modal UMKM. Dalam perjalanannya BPR kalah bersaing dengan Bank-Bank Umum yang juga menjalankan kredit usaha mikro yang pada akhirnya mematikan pangsa pasar BPR sehingga perlu diambil kebijakan dari BI mengenai batas nominal pemberian kredit bagi bank-bank umum. Di sisi lain BPR juga berperan terhadap UMKM selain mampu menyerap tenaga kerja dengan meningkatnya UMKM diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, (2012). *Laporan Perkembangan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*, Departemen Kredit, BPR dan UMKM Bank Indonesia.
- Bussiness News, (2011), Mendorong Fungsi Intermediasi Bank Pembangunan Daerah.
- Herry R, (2007), Studi Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat.
- Irawan (2011), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Potensi yang Terabaikan di unduh dari Unisdem tanggal 18 November 2012.
- Dejavu. (2012). BPRS Mulai Terancam. Didownload dari <http://www.rifka.dejavu.com>, tanggal 2 November 2012.
- Tambunan T, (2004), Strategi dan Kebijakan Memacu Pertumbuhan

Ekonomi, Mendorong penciptaan Lapangan Kerja. Dengan Meningkatkan Peran Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), *Makalah*. ISEI, Jakarta.